

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1. Pendidikan

A. Angka Partisipasi Kasar (APK) POS PAUD/ KOBER/ TPA/ SPS

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah. Indikator ini mengukur proporsi jumlah anak yang sekolah pada suatu jenjang pendidikan PAUD/TPA/KOBER/SPS dalam kelompok umur yg sesuai dg jenjang pendidikan tersebut. pada tahun 2011 angka capaian jumlah siswa pada jenjang PAUD/TK/KOBER/SPS sebanyak 3439 jiwa, terhadap jumlah penduduk usia PAUD/TK/KOBER/SPS sebanyak 21.946 jiwa atau sebanding dengan 16%, capaian ini meningkat dimana pada tahun 2010 capaian APK PAUD/KOBER/TPS/SPS baru mencapai 15 %.

B. Angka Melanjutkan (AM) POS PAUD/ KOBER/ TPA/ SPS

Angka Melanjutkan (AM) adalah perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat satu pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan jumlah lulusan pada jenjang yang lebih rendah atau jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tahun ajaran sebelumnya. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyak lulusan yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau daya tampung dari sekolah yang lebih tinggi. Pada tahun 2010 angka capaian jumlah siswa baru tingkat satu pada jenjang pendidikan SD/MI sebanyak 4.880 siswa, terhadap jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tahun ajaran sebelumnya sebanyak 2.848 siswa, sedangkan pada tahun 2011 angka capaian jumlah siswa baru tingkat satu pada jenjang pendidikan SD/MI sebanyak 5.487 siswa, terhadap jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tahun ajaran sebelumnya sebanyak 2.984 siswa.

C. Angka Putus Sekolah (APTs) PAUD/ KOBER/ TPA/ MDA

Angka Putus Sekolah (APTs) adalah perbandingan jumlah siswa yang putus sekolah dibanding dengan jumlah siswa seluruhnya. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah di suatu daerah sehingga dapat dilakukan penanggulangannya. Pada tahun 2010 angka capaian jumlah siswa yang putus sekolah pada jenjang PAUD/ KOBER/ TPA/ MDA tidak ada, terhadap jumlah siswa seluruhnya sebanyak 2.881 siswa, sedangkan pada tahun 2011 angka capaian jumlah siswa yang

putus sekolah pada jenjang PAUD/ KOBER/ TPA/ MDA tidak ada, terhadap jumlah siswa seluruhnya sebanyak 3.439 siswa.

D. Proporsi jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas yang melek huruf

Proporsi jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas yang melek huruf didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang dapat baca tulis terhadap jumlah penduduk usia diatas 15 tahun, indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang dapat baca tulis. Pada tahun 2010 angka capaian jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang dapat baca tulis sebanyak 207.075 siswa, terhadap jumlah penduduk usia diatas 15 tahun sebanyak 207.735 siswa atau sebanding 99,68% sedangkan pada tahun 2011 angka jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang dapat baca tulis sebanyak 232.279 Jiwa, terhadap jumlah penduduk usia diatas 15 tahun sebanyak 235.279 Jiwa atau sebanding 98,72%.

E. Angka Partisipasi Kasar (APK) TK dan sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah. Indikator ini mengukur proporsi jumlah anak yang sekolah pada suatu jenjang pendidikan TK/RA/sederajat dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. pada tahun 2011 angka capaian jumlah siswa pada jenjang TK/RA/sederajat sebanyak 6.376 jiwa, terhadap jumlah penduduk usia TK/RA/sederajat sebanyak 21.946 jiwa atau sebanding dengan 29.05%, capaian ini menurun dimana pada tahun 2010 capaian APK TK/RA/sederajat baru mencapai 31,56 %.

F. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah, Indikator ini mengukur proporsi jumlah anak yang sekolah pada suatu jenjang pendidikan TK/RA/sederajat dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. pada tahun 2011 angka capaian jumlah siswa pada jenjang TK/RA/sederajat sebanyak 48.929 jiwa, terhadap jumlah penduduk usia TK/RA/sederajat sebanyak 43.788 jiwa atau sebanding dengan 111.74%, capaian ini menurun dimana pada tahun 2010 capaian APK TK/RA/sederajat baru mencapai 118,09 %.

G. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) TK/RA/ sederajat Kota Cilegon Tahun Pada tahun 2010 angka capaian jumlah siswa pada jenjang TK/RA/ sederajat sebanyak 42.854 jiwa, terhadap jumlah penduduk usia TK/RA/ sederajat sebanyak 41.118 jiwa atau sebanding dengan 104,22% sedangkan pada tahun 2011 angka capaian jumlah siswa pada jenjang TK/RA/ sederajat sebanyak 42.327 jiwa, terhadap jumlah penduduk usia TK/RA/ sederajat sebanyak 43.788 jiwa atau sebanding dengan 96,66%.

H. Angka Melanjutkan SD/MI

Angka Melanjutkan (AM) adalah perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat satu pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan jumlah lulusan pada jenjang yang lebih rendah atau jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tahun ajaran sebelumnya. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyak lulusan yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau daya tampung dari sekolah yang lebih tinggi. Pada tahun 2010 angka capaian jumlah siswa baru tingkat satu pada jenjang pendidikan SMP/MTs/SMPLB sebanyak 7.415 siswa, terhadap jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya sebanyak 7.536 siswa, sedangkan pada tahun 2011 angka capaian jumlah siswa baru tingkat satu pada jenjang pendidikan SMP/MTs/SMPLB sebanyak 8.139 siswa, terhadap jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya sebanyak 7.918 siswa.

I. Angka Kelulusan (AL) SD/ MI

Angka Kelulusan (AL) adalah perbandingan antara jumlah lulusan pada jenjang tertentu dengan jumlah siswa tingkat tertinggi dari jenjang pendidikan yang sesuai dan dinyatakan dalam prosentase. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyak siswa yang lulus, dari jenjang pendidikan tertentu di suatu daerah. Pada tahun 2010 angka capaian jumlah siswa yang lulus sekolah pada jenjang SD/ MI sebanyak 7.378 siswa, terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi lulus seluruhnya sebanyak 7.378 siswa atau sebanding dengan 100%, sedangkan pada tahun 2011 angka capaian jumlah siswa yang lulus sekolah pada jenjang SD/MI sebanyak 7.333 siswa, terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi lulus seluruhnya sebanyak 7.333 siswa atau sebanding dengan 100%.

J. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ SMPLB

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah, Indikator ini mengukur proporsi jumlah anak yang sekolah pada suatu jenjang pendidikan TK/RA/ sederajat dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. pada tahun 2011 angka capaian jumlah siswa pada jenjang TK/RA/ sederajat sebanyak 25.152 jiwa, terhadap jumlah penduduk usia TK/RA/ sederajat sebanyak 21.540 jiwa atau sebanding dengan 116,76%, capaian ini meningkat dimana pada tahun 2010 capaian APK TK/RA/ sederajat baru mencapai 112,92 %.

K. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ SMPLB

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) TK/RA/ sederajat Kota Cilegon Tahun Pada tahun 2010 angka capaian jumlah siswa pada jenjang TK/RA/ sederajat sebanyak 17.626 jiwa, terhadap jumlah penduduk usia TK/RA/ sederajat sebanyak 20.385 jiwa atau sebanding dengan 86,47% sedangkan pada tahun 2011 angka capaian jumlah siswa pada jenjang TK/RA/ sederajat sebanyak 18.150 jiwa, terhadap jumlah penduduk usia TK/RA/ sederajat sebanyak 21.540 jiwa atau sebanding dengan 84,26%.

L. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ MA/ SMK/ SMLB

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah. Indikator ini mengukur proporsi jumlah anak yang sekolah pada suatu jenjang pendidikan TK/RA/ sederajat dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. pada tahun 2011 angka capaian jumlah siswa pada jenjang TK/RA/ sederajat sebanyak 20.266 jiwa, terhadap jumlah penduduk usia TK/RA/ sederajat sebanyak 21.042 jiwa atau sebanding dengan 96,31%, capaian ini meningkat dimana pada tahun 2010 capaian APK TK/RA/ sederajat baru mencapai 75,02 %.

M. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/ MA/ SMK/ SMLB

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia

sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) TK/RA/ sederajat Kota Cilegon Tahun Pada tahun 2010 angka capaian jumlah siswa pada jenjang TK/RA/ sederajat sebanyak 13.106 jiwa, terhadap jumlah penduduk usia TK/RA/ sederajat sebanyak 23.457 jiwa atau sebanding dengan 55,87% sedangkan pada tahun 2011 angka capaian jumlah siswa pada jenjang TK/RA/ sederajat sebanyak 13.441 jiwa, terhadap jumlah penduduk usia TK/RA/ sederajat sebanyak 21.042 jiwa atau sebanding dengan 63,88%.

N. Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs/SMPLB/ SMA/MA/SMK/SMLB

Angka Melanjutkan (AM) adalah perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat satu pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan jumlah lulusan pada jenjang yang lebih rendah atau jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tahun ajaran sebelumnya. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyak lulusan yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau daya tampung dari sekolah yang lebih tinggi. Pada tahun 2010 angka capaian jumlah siswa baru tingkat satu pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK/SMLB sebanyak 6.241 siswa, terhadap jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs/SMPLB tahun ajaran sebelumnya sebanyak 4.964 siswa, sedangkan pada tahun 2011 angka capaian jumlah siswa baru tingkat satu pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK/SMLB sebanyak 7.375 siswa, terhadap jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs/SMPLB tahun ajaran sebelumnya sebanyak 5.397 siswa.

O. Angka Putus Sekolah (APTs) SMP/MTs/SMPLB/ SMA/MA/SMK/SMLB

Angka Putus Sekolah (APTs) adalah perbandingan jumlah siswa yang putus sekolah dibanding dengan jumlah siswa seluruhnya. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah di suatu daerah sehingga dapat dilakukan penanggulangannya. Pada tahun 2010 angka capaian jumlah siswa yang putus sekolah pada jenjang SMP/MTs/SMPLB tidak ada, terhadap jumlah siswa seluruhnya sebanyak 4.964 siswa, sedangkan pada tahun 2011 angka capaian jumlah siswa yang putus sekolah pada jenjang SMP/MTs/SMPLB tidak ada, terhadap jumlah siswa seluruhnya sebanyak 5.397 siswa.

Angka capaian jumlah siswa yang putus sekolah pada jenjang SMA/MA/SMK/SMLB tidak ada, terhadap jumlah siswa seluruhnya sebanyak 14.013. siswa, sedangkan pada tahun 2011 angka capaian jumlah siswa yang putus sekolah pada jenjang SMA/MA/SMK/SMLB tidak ada, terhadap jumlah siswa seluruhnya sebanyak 17.843 siswa.

P. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs/SMPLB/ SMA/MA/SMK/SMLB

Angka Kelulusan (AL) adalah perbandingan antara jumlah lulusan pada jenjang tertentu dengan jumlah siswa tingkat tertinggi dari jenjang pendidikan yang sesuai dan dinyatakan dalam prosentase. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyak siswa yang lulus, dari jenjang pendidikan tertentu di suatu daerah. Pada tahun 2010 angka capaian jumlah siswa yang lulus sekolah pada jenjang SMP/MTs/SMPLB sebanyak 7.141 siswa, terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi lulus seluruhnya sebanyak 7.143 siswa atau sebanding dengan 99,97%, sedangkan pada tahun 2011 angka capaian jumlah siswa yang lulus sekolah pada jenjang SMP/MTs/SMPLB sebanyak 7.283 siswa, terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi lulus seluruhnya sebanyak 7.283 siswa atau sebanding dengan 100%.

Angka capaian jumlah siswa yang lulus sekolah pada jenjang SMA/MA/SMK/SMLB pada tahun 2010 sebanyak 4.968 siswa, terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi lulus seluruhnya sebanyak 4.934 siswa atau sebanding dengan 99,32%, sedangkan pada tahun 2011 angka capaian jumlah siswa yang lulus sekolah pada jenjang SMA/MA/SMK/SMLB sebanyak 4.262 siswa, terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi lulus seluruhnya sebanyak 4.251 siswa atau sebanding dengan 99,74%.

Q. Angka Mengulang Kelas (AMK) SMP/MTs/SMPLB/ SMA/MA/SMK/SMLB

Angka Mengulang Kelas (AMK) adalah perbandingan jumlah siswa yang mengulang kelas dibanding dengan jumlah siswa seluruhnya. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyak siswa yang mengulang di suatu daerah sehingga dapat ditentukan cara penanggulangannya. Pada tahun 2010 capaian angka mengulang kelas tingkat SMP/MTs/SMPLB sebanyak 41 siswa yang mengulang kelas, terhadap jumlah siswa seluruhnya sebanyak 21.778 siswa atau sebanding dengan 0,18% sedangkan pada tahun 2011 angka mengulang kelas sebanyak 33 siswa, terhadap jumlah siswa seluruhnya sebanyak 24.151 siswa atau sebanding dengan 0,13%.

Angka mengulang kelas tingkat SMA/MA/SMK/SMLB pada tahun 2010 capaian angka mengulang kelas sebanyak 47 siswa yang mengulang kelas, terhadap jumlah siswa seluruhnya sebanyak 16.728 siswa atau sebanding dengan 0,28% sedangkan pada tahun 2011 angka mengulang kelas sebanyak 19 siswa, terhadap jumlah siswa seluruhnya sebanyak 18.486 siswa atau sebanding dengan 0,10%.

2.3.1.2. Kesehatan

A. **Persentase kunjungan Ibu Hamil**

Pemeriksaan antenatal adalah pemeriksaan kehamilan yang dilakukan untuk memeriksakan kehamilan ibu dan janin secara berkala, yang diikuti dengan upaya koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan. Tujuannya adalah untuk menjaga agar ibu hamil dapat melalui masa kehamilannya, persalinan dan nifas dengan baik dan selamat, serta menghasilkan bayi yang sehat. Pada tahun 2011 angka capaian Jumlah ibu hamil mendapat pelayanan antenatal sesuai standar sebanyak 7.704 jiwa terhadap Jumlah sasaran ibu hamil dalam 1 tahun sebanyak 8.486 jiwa atau sebanding dengan 90,8%, capaian ini meningkat dimana pada tahun 2010 sebesar 83%.

B. **Prosentase kelurahan yang memenuhi UCI (Universal Child Immunization)**

UCI (Universal Child Immunization) yaitu imunisasi dasar secara lengkap pada anak, jumlah desa/kelurahan yang ada di Kota Cilegon ada sebanyak 43 desa/kelurahan, pada tahun 2011 jumlah Kelurahan yang sudah melakukan UCI ada sebanyak 43 Kelurahan, sehingga untuk Kota Cilegon cakupan Kelurahan yang sudah melaksanakan UCI adalah sebesar 100%, capaian ini sama dengan capaian UCI tahun 2010 yaitu sebesar 100%.

C. **Persentase penyelenggaraan penjangkauan data sarana kesehatan swasta (sarkesta)**

Pelayanan kesehatan tidak semata-mata diselenggarakan oleh pemerintah, melainkan juga melibatkan peran serta aktif segenap lapisan masyarakat dan pelbagai potensi pihak swasta, yang dimaksud sarana kesehatan swasta adalah Apotik, Klinik/Balai Pengobatan, pengobatan tradisional, Laboratorium swasta, Rumah Sakit Swasta, Radiologi klinik milik swasta. Jumlah sarana kesehatan swasta yang terdata sebanyak 125 buah. Jumlah sarana kesehatan swasta yang ada di Kota Cilegon sebanyak 125 buah atau sebanding dengan 100%. Capaian ini sama dengan capaian tahun lalu sebesar 100%.

D. **Tingkat pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan**

Salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka didukung dengan fasilitas sarana prasarana kesehatan yang memadai. Sarana dan Prasarana kesehatan yang ada di Kota Cilegon adalah :

- Puskesmas : 8 Unit

- Puskesmas Pembantu : 18 unit
- Puskesmas Keliling : 8 Unit
- Rumah bersalin : 9 unit
- Balai Pengobatan/Klinik : 53 unit
- Poskesdes : 15 Unit
- Polindes : 7 unit
- Poskestren : 2 unit
- Pos Obat Desa (POD) : 4 unit

E. Rasio jumlah poskesdes disetiap kelurahan terhadap jumlah poskesdes di kota Cilegon

Desa/Kelurahan Siaga adalah desa/kelurahan yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan, secara mandiri. Pengembangan Desa/Kelurahan Siaga dilaksanakan melalui pembentukan Poskesdes, yaitu salah satu upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan / menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa/kelurahan yang meliputi kegiatan peningkatan hidup sehat (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan (kuratif) yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (terutama bidan) dengan melibatkan kader atau tenaga sukarela lainnya. Sampai dengan tahun 2011 Jumlah Poskesdes yang ada di Kota Cilegon sebanyak 15 Poskesdes.

F. Terbentuknya poskesdes tambahan di setiap kelurahan

Poskesdes merupakan salah satu upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan / menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa/kelurahan yang meliputi kegiatan peningkatan hidup sehat (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan (kuratif) yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (terutama bidan) dengan melibatkan kader atau tenaga sukarela lainnya. Sampai dengan tahun 2011 Jumlah Poskesdes yang ada di Kota Cilegon sebanyak 15 Poskesdes.

G. Prosentase sarana dan prasarana kesehatan terhadap jumlah kelurahan

Dalam meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat maka salah satu upaya adalah peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang merata, terjangkau dan memadai. Sarana prasarana kesehatan yang ada di kelurahan yang sudah

melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan pada masyarakat (Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan fasilitas kesehatan lainnya) sebanyak 42 terhadap jumlah kelurahan yang ada di Kota Cilegon yaitu sebanyak 43 Kelurahan atau sebanding dengan 97,67% capaian ini sama dengan capaian tahun 2010 sebanyak 97,67%.

H. Jumlah perumusan kebijakan kesehatan tingkat Kota

Pelayanan pemerintah kepada masyarakat pada hakekatnya identik dengan berbagai bentuk kebijakan yang dikeluarkan di Daerah. Manifestasi dari berbagai bentuk kebijakan diatas itulah yang selanjutnya akan dirasakan secara langsung ataupun tidak langsung oleh masyarakat. Satu kebijakan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dalam kenyataanya tidak banyak menerima penolakan, jelas mendapat respon positif dari rakyat selaku pihak yang harus menerima kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah kota cilegon telah mengeluarkan satu kebijakan tentang kesehatan yaitu dengan keluarnya JAMKESDA dimana bagi masyarakat miskin dapat memeriksakan kesehatannya dengan melalui jamkesda, sebelumnya juga Pemkot cilegon telah menggratiskan rawat inap di RSUD di kelas III untuk warga cilegon. Capaian pelaksanaan pelayanan kesehatan di daerah masih mengacu kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu kebijakan yang mengacu kepada standar pelayanan minimal (SPM) yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI No 741 tahun 2008.

I. Rasio pelayanan kesehatan rujukan/kunjungan pasien miskin terhadap jumlah seluruh kunjungan

Dalam amandemen UUD 1945 pasal 28 ayat 1 dan UU no 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa kesehatan sebagai hak fundamental setiap individu juga dinyatakan secara global dalam organisasi kesehatan dunia (WHO). Hal ini karena setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya dan Negara bertanggungjawab terhadap kesehatan penduduknya termasuk masyarakat miskin dan tidak mampu. Dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh maka Pemerintah Kota Cilegon melalui SK Wali Kota Cilegon No. 440/Kep.333-Dinkes/2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang Pembebasan biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya. Di Puskesmas Pelayanan Kesehatan Dasar di gratiskan, di RSUD Pembebasan Biaya Rawat Inap Kelas 3. Pelayanan kesehatan harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat yang tidak memiliki akses langsung terhadap pelayanan kesehatan, pada tahun 2011 jumlah masyarakat miskin yang menggunakan fasilitas sarana kesehatan melalui program Jamkesda,

Jamkesmas dan Jampersal di Kota Cilegon sebanyak 18.816 jiwa dari total kunjungan pada tahun 2011 sebanyak 68.117 jiwa, sehingga nilai pencapaian Kota Cilegon untuk pelayanan kesehatan rujukan pasien miskin mencapai 27,62%. Capaian ini kurang sedikit dari tahun 2010 yang sebesar 27,93%.

2.3.1.3. Pekerjaan Umum

A. Prosentase rata-rata Jaringan irigasi yang dapat dipertahankan luas cakupan pelayanannya

Pertumbuhan penduduk dan perubahan pola ruang saat ini berdampak pada kebutuhan pasokan air terhadap lahan pertanian. Jaringan irigasi yang merupakan bangunan saluran teknis sebagai penyedia dan pengaturan air guna menunjang kegiatan pertanian, keberadaanya sangat dibutuhkan guna mempertahankan dan meningkatkan produktifitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal dan sekaligus juga berperan sebagai pengendali banjir dan genangan.(resapan air).

Upaya mempertahankan keberadaan jaringan irigasi di wilayah kota cilegon agar tetap berfungsi dan bermanfaat secara optimal dan keberlanjutan, sehingga cakupan lahan pertanian tetap terjaga merupakan tanggung jawab pemerintah melalui dukungan peningkatan bangunan saluran irigasi dan bangunan pelengkapnnya.

Pada tahun 2011, jaringan irigasi yang dapat dipertahankan luas cakupannya sebesar 30% atau 115 Ha dari 389 Ha luas jaringan pengairan.

B. Rasio panjang jalan dalam kondisi baik

Pemenuhan infrastruktur jalan dengan kondisi baik merupakan upaya pemerintah kota cilegon sebagai penyelenggara jalan.

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi sebagai pendukung kegiatan sosial-ekonomi, prasarana distribusi, pendorong perkembangan ekonomi, dan penyeimbang perkembangan antar wilayah keberadaanya kondisinya harus tetap di pertahankan.

Beberapa kegiatan penyelenggaraan jalan guna mendukung pelayanan masyarakat pengguna jalan kerap dilakukan pemerintah kota cilegon. Sampai dengan tahun 2011 panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang (mantap) sepanjang 296,5 km atau sebesar 85,13 % dari total panjang jalan sepanjang 348,31 km. bila di dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai 74,43% maka ada peningkatan kondisi jalan baik sebesar 10,7%.

C. Jumlah ruas jembatan dalam kondisi baik

Upaya pemeliharaan dan merawat keberadaan jembatan di kota cilegon merupakan tugas dan wewenang pemerintah kota cilegon. Secara eksisting jumlah bangunan jembatan sebagai sarana penghubung ruas jalan di Kota Cilegon sebanyak 51 jembatan. Sampai dengan tahun 2011 jumlah jembatan dalam kondisi baik adalah 38 atau prosentase jumlah jembatan dalam kondisi baik 70,59%.

D. Proporsi hasil pekerjaan konstruksi yang melalui pengujian laboratorium

Optimalnya suatu pekerjaan teknis bidang ke-pu-an yang ditunjang dengan sarana dan prasarana alat uji mutu yang memadai salah satu prioritas pemerintah guna memberikan pelayanan terbaik.

Kegiatan Pengujian pada laboratorium bidang ke-pu-an sebagai kegiatan yang memfasilitasi penyelenggara pembangunan sebelum melakukan kegiatan merupakan proses tahapan pelaksanaan pembangunan yang harus di laksanakan sehingga optimalisasi kegiatan dapat tercipta.

Pada tahun 2011 pencapaian sasaran proporsi pekerjaan konstruksi melalui pengujian laboratorium sebesar 96 % sehingga adanya kenaikan capaian 1 % dari tahun 2010.

E. Tingkat pemenuhan pembangunan dan Rehabilitasi Gedung

Pemenuhan dan penyediaan bangunan gedung pemerintahan yang layak dan berkualitas merupakan kewajiban pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah daerah secara berdaya guna dan berhasil guna.

Upaya pemerintah terkait pemenuhan dan rehabilitasi bangunan gedung pemerintahan salah satunya adalah memperbaiki bangunan gedung yang rusak sehingga keberadaan bangunan tetap terjaga. Disamping itu pula pemerintah kota cilegon berupaya menyeragamkan bangunan gedung kelurahan (prototype) sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada tahun 2011, angka capaian jumlah pemenuhan pembangunan dan rehabilitasi terhadap gedung pemerintahan sebesar 48,48%. atau 41 gedung pemerintahan dan bangunan kelurahan.

F. Proporsi pemenuhan kebutuhan fasilitas strategis kota

Pemenuhan kebutuhan fasilitas strategis Kota Cilegon merupakan sektor yang mempunyai multiplier effect yang tinggi dalam menumbuhkan perekonomian daerah.

Di wilayah kota cilegon secara eksisting terdapat 4 fasilitas strategis daerah (peningkatan terminal terpadu merak, lanjutan pasar kota, sub terminal, pembangunan warnasari, dan pasar agro) yang diharapkan dapat dijadikan lokomotif penggerak pertumbuhan perekonomian daerah sehingga keberadaannya sangat di tunjang dari segi kebutuhan dan kelengkapannya.

Pada tahun 2011, proporsi pemenuhan kebutuhan fasilitas strategis kota baru mencapai 15,6 %.

2.3.1.4. Perumahan

A. Prosentase rumah tidak layak huni

Prosentase rumah tidak layak huni tahun 2010 penanganannya sebanyak 80 unit rumah, sedangkan tahun 2011 penanganannya sebanyak 111 unit dari 1333 rumah tidak layak huni. Setara dengan 8.33%.

B. Proporsi ruas jalan yang telah terlayani oleh prasarana kota(PJU)

Keberadaan Penerangan Jalan Umum sebagai salah satu prasarana kota yang berfungsi sebagai pencahayaan jalan harus dilandasi oleh dua aspek, yaitu aspek fungsional yang meliputi pengaman lingkungan, pengenalan objek dan rambu jalan serta sebagai dekorasi kota. Sedangkan pada aspek yang kedua, yaitu aspek manfaat, PJU bermanfaat untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, menurunkan angka kriminalitas, orientasi kota bagi pengguna jalan, memperindah kota dan mendukung lancarnya roda perekonomian. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJMD, sasaran yang ingin dicapai pada program ini adalah meningkatnya kualitas prasarana dan arsitektur kota dengan indikasi program adalah proporsi kebutuhan PJU pada 392 ruas jalan, dengan total panjang 348,31 km. Pada tahun 2011 total PJU yang sudah ada sebesar 2872 titik dari total kebutuhan di jalan kota sebanyak 7821 titik di seluruh ruas jalan kota, sehingga tingkat capaiannya sebesar 36.72%

C. Proporsi cakupan kawasan yang sudah direvitalisasi secara arsitektural

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJMD, sasaran yang ingin dicapai pada program ini adalah meningkatnya kualitas prasarana dan arsitektur kota dengan indikasi proram adalah proporsi cakupan kawasan yang

sudah direvitalisasi secara arsitektural. Pada tahun 2011 capaian proporsi kawasan yang telah direvitalisasi secara arsitektural adalah 30%

2.3.1.5. Penataan Ruang

A. Proporsi jumlah bangunan gedung yang sudah ber IMB terhadap Jumlah bangunan gedung yang ada

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJMD, sasaran yang ingin dicapai pada program ini adalah meningkatnya penataan kota melalui pengendalian bangunan gedung, dengan indikasi program adalah proporsi jumlah bangunan gedung yang sudah ber IMB terhadap jumlah bangunan yang ada. Sampai dengan tahun 2011 jumlah bangunan gedung yang sudah ber IMB sebanyak 5.452 Bangunan gedung sedangkan jumlah bangunan gedung yang ada sebanyak 118.853 bangunan gedung sehingga capaian proporsi adalah 5%.

B. Proporsi jumlah Wajib Pajak Reklame yang aktif terhadap jumlah wajib pajak yang ada.

Reklame adalah suatu benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan dan memujikan suatu barang, jasa atau seseorang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau seseorang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Setiap orang, pribadi atau badan hukum yang akan menyelenggarakan reklame, harus mendapat izin dari kepala daerah melalui instansi yang ditunjuk. Semua Reklame yang telah memperoleh izin otomatis dikenakan pajak reklame, sehingga setiap penyelenggara reklame akan menjadi wajib pajak yang akan dipungut setiap setahun sekali. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJMD, sasaran yang ingin dicapai pada program ini adalah meningkatnya penataan kota melalui tata informasi (reklame) dengan indikasi program adalah proporsi jumlah wajib pajak reklame yang aktif membayar pajak terhadap jumlah wajib pajak reklame yang ada. Pada tahun 2011 capaian proporsi WP aktif adalah 312 WP dari 362 WP yang tercatat pada tahun 2010 selain itu ada penambahan WP baru pada tahun 2011.

C. Proporsi ketersediaan dokumen perencanaan detail tata ruang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJMD, sasaran yang ingin dicapai pada program ini adalah meningkatnya kualitas penataan ruang dengan indikasi proram adalah proporsi ketersediaan dokumen perencanaan detail tata ruang. Proporsi ini didasarkan pada kebutuhan dokumen sebagai implementasi berlakunya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cilegon. Pada RTRW 2010-2030 terdapat landasan penerbitan rencana rinci yaitu 5 RDTR BWK dan 3 RTR Kawasan Strategis Kota. Hingga tahun 2011 dokumen perencanaan rinci berjumlah 5 dokumen atau dengan capaian 100%. Namun dokumen rencana rinci tersebut mengacu pada produk RTRW lama sehingga perlu penyediaan dokumen perencanaan detail sebagaimana ketentuan di atas.

D. Jumlah juklak dan juknis prasarana kota, reklame dan tower

Salah satu misi Dinas Tata Kota adalah Mewujudkan penataan prasarana dan arsitektur kota dalam menunjang pengelolaan kawasan perkotaan yang berkualitas. Untuk itu diperlukan suatu perangkat berupa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak dan Juknis). Perangkat aturan ini akan menjadi pedoman teknis dalam menata prasarana kota, reklame dan tower telekomunikasi. Salah satu bentuk realisasi ketersediaan juklak dan Juknis tersebut adalah penyusunan Buku Pedoman Teknis Pemasangan Utilitas Bawah Tanah pada Ruas Jalan Lingkar Selatan (JLS), yang dilaksanakan pada tahun Anggaran 2011. Sedangkan pada rencana hingga tahun 2015 akan disusun 2 jenis pedoman teknis, yaitu dokumen Master Plan PJU dan Tower serta dokumen Pedoman zonasi perletakan media reklame.

2.3.1.6. Perencanaan Pembangunan

A. Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4 Ayat 1, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Daerah tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Dokumen RKPD mempunyai peranan sangat strategis, karena

menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan untuk tahun 2012 RKPD Kota Cilegon telah disahkan melalui peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2011

B. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2010-2015 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kota Cilegon untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Banten. RPJMD Kota Cilegon merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cilegon. RPJMD Kota Cilegon tahun 2010-2015 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011

C. Tingkat pemenuhan kebutuhan perencanaan pembangunan ekonomi

Perencanaan pembangunan daerah merupakan konsep pembangunan yang menyeluruh dan merata, dalam pelaksanaannya harus dipenuhi dokumen perencanaan yang matang sehingga pelaksanaan perencanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan terstruktur pada tataran implementasinya sehingga bisa efektif dan efisien, khususnya perencanaan pembangunan bidang perekonomian, kegiatan yang ada pada bidang perekonomian pada tahun 2011 berjalan dengan lancar dengan hasil realisasi mencapai 100%, jumlah kajian dan penelitian perekonomian yang mendukung perencanaan pembangunan daerah sebanyak 8 dokumen.

D. Tingkat pemenuhan kebutuhan perencanaan pembangunan sosial budaya

Perencanaan pembangunan daerah merupakan konsep pembangunan yang menyeluruh dan merata, dalam pelaksanaannya harus dipenuhi dokumen perencanaan yang matang sehingga pelaksanaan perencanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan terstruktur pada tataran implementasinya sehingga bisa efektif dan efisien, khususnya perencanaan pembangunan bidang sosial dan pemerintahan, kegiatan yang ada pada bidang sosial dan pemerintahan pada tahun 2011 berjalan dengan lancar dengan hasil realisasi mencapai 100%, jumlah kajian dan penelitian sosial dan pemerintahan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah sebanyak 7 dokumen.

E. Tingkat pemenuhan kebutuhan perencanaan pembangunan prasarana wilayah

Perencanaan pembangunan daerah merupakan konsep pembangunan yang menyeluruh dan merata, dalam pelaksanaannya harus di penuhi dokumen perencanaan yang matang sehingga pelaksanaan perencanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan terstruktur pada tataran implementasinya sehingga bisa efektif dan efisien, khususnya perencanaan pembangunan prasarana wilayah, kegiatan yang ada pada bidang prasarana wilayah pada tahun 2011 berjalan dengan lancar dengan hasil realisasi mencapai 100%, jumlah kajian dan penelitian prasarana wilayah yang mendukung perencanaan pembangunan daerah sebanyak 9 dokumen.

2.3.1.7. Perhubungan

A. Tingkat pelayanan perhubungan darat

Baik tidaknya kualitas pelayanan perhubungan darat antara lain dapat dilihat dari kelengkapan sarana lalu lintas darat yang tersedia. Sarana lalu lintas yang dimaksud antara lain meliputi rambu lalu lintas, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan. Dengan kelengkapan sarana tersebut maka keselamatan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas dapat tercipta sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat pelayanan perhubungan darat sangat baik.

Pada tahun 2011 jumlah sarana lalu lintas darat di Kota Cilegon sebanyak **162 unit** (traffic cone 150 unit, warning light 1 unit, traffic light 4 unit, guardrail 2 unit, rambu standar 5 unit, dari target **262 unit** atau sebanding dengan **61,69 %**, capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2010 sebanyak **158 unit**.

B. Rasio ketersediaan sarana prasarana perhubungan terhadap kebutuhan

Yang dimaksud sarana prasarana perhubungan adalah suatu unsur penting yang memberi pelayanan dengan fungsi transportasi yang menunjang kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini sarana prasarana perhubungan di Kota Cilegon meliputi terminal, halte, pintu perlintasan sebidang, alat uji kendaraan bermotor, dan alat sistem parkir.

Pada tahun 2011 total sarana prasarana perhubungan yang tersedia sebanyak **27 unit** sedangkan kebutuhan mencapai **39 unit**. Berdasarkan data tersebut maka didapat rasio ketersediaan sarana prasarana perhubungan terhadap kebutuhan adalah **69,23 %** yang meningkat **0,90 %** dari tahun 2010.

C. Tingkat pelayanan perhubungan laut

Minimnya kewenangan Pemkot terhadap wilayah perairan/laut, maka tidak banyak pelayanan yang dapat dilakukan oleh Dishub Kota Cilegon dalam bidang perhubungan laut. Tingkat pelayanan perhubungan laut di Kota Cilegon dapat dinilai berdasarkan **dukungan pengawasan** wilayah perairan yang dilaksanakan oleh Administrator Pelabuhan (ADPEL). Pada tahun 2011 tidak terdapat kasus keselamatan dan keamanan laut, sedangkan tahun 2010 terjadi 1 kecelakaan kapal di perairan cilegon. Dengan demikian terjadi penurunan kecelakaan lalu lintas laut.

D. Proporsi penyelenggaraan telekomunikasi yg tidak menggunakan spektrum frekuensi radio yang memiliki izin

Berdasarkan kegiatan pendataan yang telah dilakukan bahwa sampai saat ini, di Kota Cilegon semua telah menggunakan spektrum frekuensi radio yaitu sebanyak 2.397 penyelenggara.

E. Proporsi kantor jasa titipan dan pengiriman barang yang memiliki izin

Dalam bidang pos, tidak jauh berbeda dengan bidang telekomunikasi, pelayanan yang dilakukan Dishub meliputi kegiatan pendataan, pengawasan, dan penertiban terhadap kantor jasa titipan dan pengiriman barang yang ada di Kota Cilegon demi terwujudnya pelayanan pos yang berkualitas dan memadai. Pada tahun 2011, total jumlah kantor jasa titipan dan pengiriman barang yang ada di Kota Cilegon adalah **40 unit**, sedangkan yang memiliki izin hanya **31 unit**. Dengan demikian maka proporsi capaian program ini untuk bidang pos pada tahun 2011 sebesar **77,50 %**.

2.3.1.8. Lingkungan Hidup

A. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air

Sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 mengenai Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air dengan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi. Indikator ini mengukur proporsi jumlah usaha dan/atau kegiatan

yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air. Di Kota Cilegon pada tahun 2011 terdapat 30 jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air dari 50 jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi, atau secara proporsional mencapai 60%. Capaian ini meningkat bila dibanding tahun 2010 di mana proporsi jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air mencapai 58%.

B. Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara

Sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 mengenai Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara dengan jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yang telah di inventarisasi. Indikator ini mengukur proporsi jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara. Pada tahun 2011 di Kota Cilegon terdapat 47 jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara dari 65 jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yang telah di inventarisasi, atau secara proporsional mencapai 72,31%. Capaian ini meningkat bila dibanding tahun 2010 di mana proporsi jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara mencapai 69,23%.

C. Luas Total lahan yang di Hijaukan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJMD, sasaran yang ingin dicapai pada program ini adalah meningkatnya luasan lahan yang di hijaukan (dalam satuan Ha). Meski demikian, ada batasan mengenai program penghijauan yang dimaksud yang disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Cilegon yaitu pada Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dan berdasarkan tugas pokok dan organisasi dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Cilegon, program penghijauan dimaksud adalah merupakan Hutan Kota, yang menjadi bagian dari RTH

sebagaimana termaktub dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cilegon. Pada tahun 2011 luas total lahan yang dihijaukan mencapai 99 Ha, bertambah 25 Ha dari tahun 2010 yang sebesar 74 Ha. Capaian ini meningkat 33,78% dari luas total lahan yang dihijaukan di tahun 2010, sehingga luas lahan atau hutan kritis yang belum direhabilitasi pada tahun 2011 seluas 1264 Ha.

D. Proporsi kasus lingkungan yang di selesaikan

Merupakan indikasi dari penegakan hukum lingkungan hidup, yang didefinisikan sebagai perbandingan antarajumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemda terhadap total jumlah kasus lingkungan yang terjadi. Pada tahun 2011 terdapat 3 (tiga) kasus lingkungan yang terjadidan ke-3 kasus lingkungan tersebut telah diselesaikan (proporsi penyelesaian 100%).

E. Persentase cakupan penanganan sampah

Cakupan penanganan sampah adalah jumlah sampah yang terangkut ke TPSA terhadap jumlah timbulan sampah yang ada. Untuk mengetahui cakupan penanganan sampah pada tahun 2010 perkiraan volume timbulan sebesar 762 M³/hari dari jumlah penduduk sebesar 373.440 jiwa, (asumsi : 2 liter/jiwa/hari). Volume timbulan sampah terangkut ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Bagendung sekitar 338 M³/hari (48,255%). Sedangkan pada tahun 2011 volume timbulan sebesar 771 M³/hari dari jumlah penduduk sebesar 378.886 jiwa, dengan volume timbulan sampah terangkut ke TPA sekitar 372 M³/hari (50%). Dengan demikian pada tahun 2011 ini persentase cakupan penanganan sampah mengalami peningkatan sebesar 1,745%.

F. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Pembangunan tempat pembuangan sampah (TPS) merupakan salah satu sarana pendukung dalam pelayanan persampahan. Semakin banyak TPS yang tersebar akan semakin memudahkan petugas dalam melakukan pengangkutan sampah ke TPA, jumlah TPS di Kota Cilegon sampai dengan saat ini adalah sebanyak 95 unit yang tersebar di beberapa lokasi, dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 adalah sebanyak 378.886, dengan rasio 1 TPS melayani 1000 penduduk maka pada tahun 2011 rasio TPS terhadap satuan penduduk di kota cilegon sebesar 25 %.

G. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

Keberadaan RTH dalam suatu perkotaan atau disebut juga Hutan kota merupakan suatu ekosistem dari komunitas tumbuh-tumbuhan berupa pohon dan asosiasinya yang tumbuh di lahan kota atau sekitar kota, berbentuk jalur, menyebar atau bergerombol (menumpuk) dengan struktur meniru (menyerupai) hutan alam, membentuk habitat yang memungkinkan kehidupan bagi satwa dan menimbulkan lingkungan sehat, nyaman, dan estetis.

Perkembangan industri di wilayah Kota Cilegon yang semakin pesat akan berdampak kepada penurunan kualitas lingkungan terutama meningkatnya kadar CO_2 atau disebut juga polusi udara akibat dari kegiatan industri sehingga ketersediaan Hutan Kota (RTH) sangatlah penting demi keberlangsungan makhluk hidup. Pemerintah Kota Cilegon selain melakukan penghijauan kotajuga sedang menginventarisir Asset RTH dan Taman yang menjadi kewenangan Pemerintah. Untuk Taman Kota di Kota Cilegon saat ini tercatat 21,36 Ha dan yang tertangani baru mencapai 3,7 ha sedangkan tahun 2010 yang tertangani 1,066 Ha. Sehingga capaiannya untuk tahun 2011 adalah sebesar 17,32%

2.3.1.9. Pertanahan

A. Tingkat Status tanah pemerintah Daerah

Tanah pemerintah daerah merupakan aset milik pemerintah daerah yang semestinya diperkuat oleh bukti legalitas yang otentik dalam bentuk sertifikat, permasalahan kasus tanah pemerintah daerah dapat berupa permasalahan dalam status hak penggunaan dan kepemilikan. hal ini dapat terjadi karena lemahnya administrasi pertanahan di instansi yang mengeluarkan legalitas status pertanahan. Karena fungsi dan peranan tanah yang begitu besar banyak timbul permasalahan atau sengketa yang terjadi, sehingga dalam menyikapi hal tersebut Pemerintah Kota Cilegon secara terus menerus melakukan pensertifikatan atas tanah-tanah yang dimiliki dengan tujuan agar tanah yang menjadi aset Pemerintah Daerah mempunyai kepastian dan kekuatan hukum, sampai dengan tahun 2011 total status tanah eks bengkok yang dimiliki pemerintah daerah Kota Cilegon $\pm 763.037 \text{ m}^2$ dalam 311 bidang, adapun yang sudah bersertifikat $\pm 454.991 \text{ m}^2$ dalam 235 bidang tanah, sisanya $\pm 308.046 \text{ m}^2$ dalam 76 bidang tanah masih dalam tahap verifikasi atau baru sekitar 75,56 % status tanah milik pemda yang bersertifikat.

2.3.1.10. Kependudukan dan Catatan Sipil

A. Tingkat Kinerja Pelayanan administrasi Kependudukan

Untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang prima bagi semua pemohon administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon terus meningkatkan kinerja di dalam memberikan pelayanan publik. yaitu di ukur dari Jumlah pemohon KTP yg dapat diselesaikan 7 hari sebanyak 2755 orang dan Jumlah pemohon KTP 2995 orang, maka tingkat capaian kinerja pelayanan administrai kependudukan adalah 92 %

B. Tingkat Kinerja pelayanan pencatatan sipil

Dalam mendukung capaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil yaitu di dalam mengukur tingkat kinerja pelayanan pencatatan sipil, diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM, perbaikan kualitas kinerja dan penyempurnaan sistem, serta intensitas koordinasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sehingga tingkat pelayanan kepada masyarakat dapat di tingkatkan dengan mengukur dari jumlah pemohon Akte Kelahiran yg dapat diselesaikan 30 hari sebanyak 19167 lembar dan Jumlah pemohon Akte Kelahiran sebanyak 19167 lembar, maka persentase di dalam Tingkat Kinerja pelayanan pencatatan sipil adalah 100 %

C. Tingkat validasi, akurasi dan up-to-datenya data kependudukan

Di butuhnya tingkat Validasi yang akurat dan up-to-datenya data administrasi kependudukan di nilai sangat penting di dalam mengukur sudah sejauh mana tingkat kinerja pelayanan administrasi kependudukan yang sudah di jalankan. ada pun capaian tingkat Validasi, akurasi dan up-to-datenya data kependudukan 80 %.

2.3.1.11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

A. Proporsi jumlah pengaduan tidak kekerasan yang ditindaklanjuti

Salah satu capaian kinerja pemerintah Kota Cilegon dalam program pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak melalui pelayanan pengaduan tindak kekerasan adalah rasio jumlah pengaduan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang ditindaklanjuti dengan kegiatan operasional P3KC. Penanganan pengaduan tindak

kekerasan pada tahun ini sebanyak 17 kasus. Hal ini terjadi penurunan / berkurang kasus KDRT dari tahun 2010 sebanyak 19 kasus.

B. Proporsi partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Salah satu capaian kinerja pemerintah Kota Cilegon dalam Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan melalui partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah rasio jumlah pegawai pemerintah di lingkungan Kota Cilegon pada tahun 2011 sebanyak 6.034 pegawai dengan jumlah pegawai perempuan yang berjumlah 3.454 pegawai atau 57 % . Bila dibandingkan pada tahun 2010 jumlah pegawai perempuan yang bekerja di pemerintahan sebanyak 3.326 pegawai hal ini meningkat 1.04 % tahun sebelumnya dan mencapai target yang ditetapkan sebesar 0,5 %.

2.3.1.12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

A. Angka laju pertumbuhan penduduk

Salah satu program pemerintah Kota Cilegon adalah program **pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas keluarga kecil** yang pertumbuhannya berdasarkan jumlah pertumbuhan penduduk Kota Cilegon pada tahun 2011 berdasarkan angka sementara BPS adalah sebesar 378.886 jiwa dan jumlah penduduk tahun 2010 sebesar 373.440 jiwa sehingga laju pertumbuhan penduduk kota cilegon sebesar 1,46 %. Terjadinya pertumbuhan jumlah penduduk disebabkan selain dari angkakelahiran juga dari migrasi penduduk dari luar daerah yang mencari pekerjaan karena Kota Cilegon merupakan daerah industri.

B. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kesertaan ber – KB

Salah satu capaian kinerja pemerintah Kota Cilegon dalam program **pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas keluarga kecil** adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam kesertaan ber KB. Jumlah keluarga peserta KB pada tahun 2011 sebanyak 52.814 , jumlah keluarga di kota Cilegon tahun 2011 sebanyak 84.196 KK, capaian tingkat partisipasi masyarakat dalam ber KB sebesar 62,7%

C. Rasio Jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) yang menjadi peserta KB terhadap PUS yang ada

Salah satu capaian kinerja pemerintah Kota Cilegon dalam program pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas keluarga kecil melalui PUS

(Pasangan Usia Subur) yang menjadi peserta KB adalah Jumlah PUS yang ada di Kota Cilegon pada tahun 2011 sebanyak 69.322 peserta, Jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) yang menjadi peserta pada KB pada tahun 2011 sebanyak 52.814 atau 76,18 %. Maka capaian program ini telah memenuhi dari target yang telah ditetapkan sebesar 73% pada tahun 2011.

D. Peningkatan proporsi jumlah kelompok catur bina terhadap jumlah balita

Salah satu capaian kinerja pemerintah Kota Cilegon dalam program Bina Keluarga Sejahtera melalui catur bina terhadap jumlah balita adalah Peningkatan proporsi jumlah kelompok catur bina terhadap jumlah balita. Jumlah balita pada tahun 2011 sebanyak 31.900 kelompok dan jumlah kelompok catur bina pada tahun 2011 sebanyak 118 kelompok atau 37 %. Hal ini tercapainya capaian program yang telah ditargetkan sebesar 20% pada tahun 2011.

2.3.1.13. Sosial

A. Proporsi jumlah PMKS (PSK, Anjal/gepeng, Lansia, Penyandang cacat) yang mandiri terhadap total jumlah PMKS yang dibina

Keberhasilan di dalam penanganan PMKS adalah meningkatnya derajat kemampuan dan keterampilan dari segi ekonomi yang lebih baik, adapun jumlah PMKS yang mandiri : PSK : 5, Anjal/Gepeng : 15, LU : 40, Eks Napza : 10, Anjal : 10 sedangkan jumlah total PMKS yang di bina pertahun 55 orang.

B. Prosentase jumlah pelayanan orang terlantar dalam perjalanan dan jenazah terlantar

Kegiatan aksi yang di lakukan oleh Dinas Sosial yaitu memberikan bantuan terhadap orang yang dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya seperti orang miskin, terlantar, cacat yang tidak memiliki biaya untuk ongkos ke tempat tujuan dan pemakaman Jenazah terlantar bagi masyarakat yang tidak memiliki keluarga.

adapun jumlah orang terlantar dalam perjalanan dan jenazah terlantar yang dilayani sebanyak 220 orang terhadap jumlah orang terlantar dalam perjalanan dan jenazah terlantar yang dilaporkan sebanyak 220 orang. maka prosentase jumlah pelayanan orang terlantar dalam perjalanan dan jenazah terlantar 100 %

C. Proporsi peningkatan PSKS aktif

Pemerintah Kota Cilegon membutuhkan bantuan peran lembaga kesejahteraan sosial sangatlah penting dikarenakan sebagai wadah untuk mendukung percepatan penanganan PMKS tersebut. Jumlah lembaga PSKS tahun 2011 adalah 29 lembaga sedangkan di tahun 2010 sebanyak 27 lembaga.

D. Proporsi peningkatan TKSM aktif

Di dalam partisipasi masyarakat di dalam penanggulangan PMKS di Kota Cilegon di harapkan adanya keikutsertaan dan kepedulian bersama di dalam mengatasi permasalahan sosial adapun jumlah TKSM yang aktif di Kota Cilegon sebanyak 243 orang.

E. Proporsi korban bencana yang ditangani

Penanggulangan Permasalahan bencana alam di harapkan mampu menyentuh aspek sosial yang langsung kepada masyarakat di tahun 2011 jumlah korban bencana yang di tangani sebanyak 660 jiwa sedangkan di tahun 2010 sebanyak 1.135 jiwa.

F. Jumlah masyarakat miskin sektor informal yang tercakup dalam Askesos

Di dalam meningkatkan keterampilan dan kemampuan kesejahteraan masyarakat miskin, dengan ini Dinas Sosial yang tercakup dalam Askesos sebanyak 200 orang.

G. Jumlah Tagana yang terlatih

TAGANA pada hakekatnya adalah wadah berhimpun seluruh kekuatan komponen penanggulangan bencana berbasis masyarakat khususnya dari unsur generasi muda di Kota Cilegon.

Melalui Dinas Sosial Kota Cilegon mengadakan Pembinaan dan pelatihan tagana dengan tujuan agar para anggota tagana terlatih dan lebih terampil. adapun Jumlah Tagana yang terlatih di tahun 2011 sebanyak 270 orang, ada peningkatan apabila di bandingkan dengan tahun 2010 sebanyak 183 orang.

H. Prosentase peningkatan kualitas kehidupan beragama

Beragama dan beribadat menurut keyakinan masing-masing adalah salah satu unsur dari hak azasi manusia (HAM) yang wajib dihormati dan dilindungi keberadaannya. Di Indonesia, hak tersebut terdapat dalam UUD 1945 (amandemen) Bab XI pasal 29 ayat (1) yang menegaskan bahwa "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa", dan ayat (2) bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.”

Pembangunan bidang agama merupakan upaya untuk mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama. Selain itu, pembangunan bidang agama juga mencakup dimensi peningkatan kerukunan hidup umat beragama yang mendukung peningkatan saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat. Dimensi kerukunan ini sangat penting dalam rangka membangun masyarakat yang memiliki kesadaran mengenai realitas multikulturalisme dan memahami makna kemajemukan sosial sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis, sehingga di Kota Cilegon menjadi kota yang kondusif dalam menjalankan di segala aktifitas, prosentase peningkatan kualitas kehidupan beragama mencapai 100%.

I. Jumlah sosialisasi dan pembinaan pengamalan keagamaan serta kualitas lingkungan peribadatan

Beberapa perkembangan penting yang dicapai dalam pembangunan bidang agama, antara lain: meningkatnya fasilitas berbagai sarana peribadatan untuk memberikan pelayanan kehidupan agama yang lebih bermutu dan merata, meningkatnya kualitas manajemen penyelenggaraan ibadah haji, penguatan kapasitas lembaga sosial keagamaan dalam pengelolaan dana sosial keagamaan dan pemberdayaan umat, dan terbentuknya berbagai forum komunikasi antarumat beragama untuk mendukung terwujudnya kerukunan intern dan antarumat beragama.

Pada tahun 2011 Pemerintah Kota Cilegon telah memberikan bantuan secara stimulant untuk peningkatan fasilitas sarana dan prasarana keagamaan sebanyak 797 dari 1100 usulan sekitar 72,45 % (mesjid, mushola, madrasah, pondok pesantren, OKP, dll)

2.3.1.14. Ketenagakerjaan

A. Rasio jumlah tenaga kerja terampil yang ditempatkan terhadap jumlah tenaga kerja yang dibina/ difasilitasi

Salah satu indikator keberhasilan Dinas Tenaga Kerja dalam membina masyarakat melalui pembinaan ketrampilan khusus adalah pelatihan las industri, servis sepeda motor dengan seluruh peserta yang dibina sebanyak 40 orang. Realisasi tenaga kerja terampil yang ditempatkan sebanyak 31 orang atau 78 % dari target 25,40 %, berarti hal ini tercapai dari target yang ditetapkan.

B. Proporsi jumlah perusahaan yang menerapkan K3 terhadap total jumlah perusahaan

Salah satu indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dalam pengawasan maupun pembinaan ke perusahaan perihal K3. Perusahaan di Kota Cilegon sejumlah 677 perusahaan, dan yang wajib memiliki sertifikasi SMK3 222 perusahaan. Dan perusahaan yang telah membentuk lembaga K3 50 perusahaan atau 22,5% dari target 5% yang ditetapkan.

C. Proporsi jumlah perusahaan yang memiliki sertifikasi K3 terhadap total jumlah perusahaan

Salah satu indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dalam pengawasan maupun pembinaan ke perusahaan perihal K3. Perusahaan di Kota Cilegon sejumlah 677 perusahaan, dan yang wajib memiliki sertifikasi SMK3 222 perusahaan. Dan perusahaan yang telah memiliki sertifikasi K3 8 perusahaan atau 3,6%.

D. Jumlah perusahaan yg telah memiliki LKS Bipartit

Salah satu indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dalam peningkatan hubungan industril yaitu dengan indikator jumlah perusahaan yang telah memiliki LKS bripartit sebanyak 64 unit dari 677 perusahaan atau 9,5% . Hal ini tercapainya target 3% yang ditetapkan.

2.3.1.15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

A. Jumlah koperasi yang aktif

Salah satu kinerja pemerintah Kota Cilegon dengan program peningkatan dan pengembangan koperasi dan UKM yaitu pada perkoperasian. Jumlah koperasi sampai tahun 2011 berjumlah 500 koperasi sedangkan yang aktif sebanyak 273 koperasi hal ini meningkat dari tahun 2010 yaitu berjumlah 249 koperasi atau meningkat 24 koperasi dari target yang akan dicapai sebanyak 20 koperasi.

B. Jumlah UKM yang meningkat statusnya dari usaha kecil menjadi usaha menengah

Salah satu kinerja pemerintah Kota Cilegon dengan program peningkatan dan pengembangan koperasi dan UKM yaitu pada UKM. Jumlah usaha mikro dan kecil sampai dengan tahun 2011 sebesar 29.106 pelaku usaha dan jumlah usaha kecil dan menengah mencapai 12.474 pelaku usaha. Jumlah UKM yang meningkat statusnya dari usaha kecil menjadi menengah sebanyak 5 pelaku usaha, hal tercapai dari target sebesar 5 pelaku usaha.

2.3.1.16. Penanaman Modal

A. Pertambahan Investasi Daerah

Kota Cilegon merupakan kota industri yang terdiri industri padat modal yang mana dipenuhi dengan investasi PMA dan PMDN. Dengan masih tersedianya lahan industri Kota Cilegon masih berupaya menarik investor untuk menanam investasi di Kota Cilegon, sampai saat ini investasi yang telah tertanam sebesar Rp. 157,6 Triliyun hal ini meningkat Rp. 93,39 Triliyun dari tahun 2010 sebesar Rp. 64,21 Triliyun atau 245.44 %. Target Kota Cilegon memenuhi capaian sasaran (target di RPJMD 1,25 triliyun).

2.3.1.17. Kebudayaan

A. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung

Kota Cilegon merupakan Kota Industri yang juga memiliki potensi pariwisata untuk dikunjungi para wisatawan mancanegara, akan tetapi potensi tersebut belum dapat tergali dengan baik dari segi pengelolaan ataupun dari segi sarana dan prasarannya. Pada tahun 2011 ini wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Cilegon sebanyak 11.506 orang.

B. Jumlah Wisatawan Domestik yang berkunjung

Berbeda dengan halnya wisatawan domestik yang masih mendominasi kunjungan wisata dengan jumlah 119.536 orang

C. Proporsi jumlah seni yang dibina terhadap total jenis seni

Jumlah Seni yang ada sebanyak 21 jenis, pada tahun 2011 ditargetkan 2 jenis seni yang dibina sedangkan yang telah dibina pada tahun 2011 sebanyak 8 jenis, indikator pada capaian ini telah mencapai target.

D. Jumlah sanggar seni yang dibina

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cilegon dalam hal ini sanggar seni telah dibina sebanyak 5 Sanggar seni dari jumlah 30 sanggar seni yang ada.

Saat ini pemerintah kota Cilegon telah memiliki gedung sanggar seni dan budaya yang akan difungsikan sebagai sarana pembinaan, pengembangan dan pementasan seni budaya kota Cilegon.

2.3.1.18. Kepemudaan dan Olahraga

A. Tingkat Pemenuhan sarana olahraga

Dalam rangka untuk memajukan atlit-atlit yang berprestasi dan menunjang kebutuhan atlet prestasi untuk berlatih dalam mengembangkan dan menyediakan sarana olah raga bagi para atlit berprestasi. Selain itu sarana dan prasarana ini sebagai salah satu upaya pemerintah daerah dalam membina, mengembangkan dan menyediakan sarana olah raga bagi para atlet dan masyarakat Kota Cilegon. pada tahun 2011 angka capaian tingkat Pemenuhan sarana olahraga untuk Jumlah sarana Olahraga yang ada sebanyak 1597 buah, terhadap Total jumlah sarana olahraga yang dibutuhkan

sebanyak 26.000 buah untuk kelengkapan 41 pengcab dan 149 sekolah baru bisa terpenuhi sebesar 5.93 %, capaian ini meningkat dibanding tahun 2010 dimana capaian jumlah sarana Olahraga yang ada terhadap total jumlah sarana olahraga yang dibutuhkan mencapai 2.93%.

B. Tingkat pembinaan atlet olahraga

Dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa yang dilakukan setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi atlet di setiap even cabang olah raga perlu adanya motivasi dari pemerintah Kota Cilegon untuk membina dan mengembangkan olah raga secara kontinue bagi atlet di setiap cabang olah raga diharapkan dapat menciptakan atlet yang berprestasi pada cabang olah raga Sehingga perlu adanya upaya pemerintah untuk memberikan perhatian dan pembinaan yang lebih pada berbagai cabang olah raga.

Pada tahun 2011 angka capaian tingkat pembinaan jumlah atlet menurut jenis cabang olah raga yang dibina sebanyak 1103 orang, terhadap Total jumlah atlet menurut jenis cabang olah raga yang ada sebanyak 2793 orang atau sebanding dengan 39.5 %.

C. Tingkat Pembinaan Pemuda

Dalam upaya pembinaan kinerja pemuda atau pelajar dalam beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam berorganisasi sehingga diharapkan para pemuda dan pelajar dapat mengaktualisasi dirinya menjadi intelektual yang kritis, kreatif dan imajinatif serta berdaya guna dan berhasil guna dalam pembangunan. pada tahun 2011 angka capaian Tingkat Pembinaan Pemuda (rasio jumlah pemuda yang dibina sebanyak 1100 orang, terhadap total jumlah pemuda yang ada) sebanyak 4170 orang atau sebanding dengan 26.4%, capaian ini meningkat dimana pada tahun 2010 capaian jumlah pemuda yang dibina terhadap total jumlah pemuda yang ada baru mencapai 19.2 %

D. Tingkat Pembinaan Pramuka

Dalam upaya meningkatkan partisipasi dan pengembangan anggota pramuka khususnya pramuka agar dapat menjalankan fungsi kepramukaan sesuai dengan prinsip Dasa Darma Pramuka. Karena dengan terbinanya anggota pramuka, yang dapat menghasilkan pemuda dan pelajar yang berkpribadian. pada tahun 2011 angka capaian Tingkat Pembinaan Pramuka (rasio jumlah pramuka yang dibina sebanyak 6000 orang, terhadap total jumlah pramuka yang ada) sebanyak 15.994 orang atau sebanding dengan 37.51 %.

E. Tingkat Pembinaan organisasi Pemuda

Dalam upaya pembinaan kinerja organisasi pemuda dalam beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam berorganisasi sehingga diharapkan para pemuda dan pelajar dapat mengaktualisasi dirinya menjadi intelektual yang kritis, kreatif dan imajinatif serta berdaya guna dan berhasil guna dalam pembangunan.

Pada tahun 2011 angka capaian Tingkat Pembinaan Organisasi Pemuda (rasio jumlah kelompok organisasi kepemudaan yang dibina sebanyak 50orang, terhadap total jumlah kelompok organisasi pemuda yang ada sebanyak 115 orang atau sebanding dengan 43.5%, capaian ini meningkat dimana pada tahun 2010 capaian Jumlah kelompok organisasi kepemudaan yang di bina terhadap Jumlah kelompok organisasi kepemudaan yang ada baru mencapai 30.43%.

F. Tingkat Pembinaan organisasi Pramuka

Dalam upaya meningkatkan dan menumbuh kembangkan kreativitas dan kredibilitas dan membentuk watak kepemimpinan, untuk meningkatkan kwaran dan untuk meningkatkan anggota dewan kerja ranting dan wadahnya khususnya organisasi kepramukaan agar dapat menjalankan fungsi kepramukaan sesuai dengan prinsip Dasa Darma Pramuka.

Pada tahun 2011 angka capaian Tingkat Pembinaan Pramuka (rasio jumlah kelompok organisasi pramuka yang dibina sebanyak 130orang, terhadap total jumlah kelompok organisasi pramuka yang ada) sebanyak 404orang atau sebanding dengan 32.2 %, capaian ini meningkat dimana pada tahun 2010 capaian jumlah kelompok organisasi pramuka yang dibina terhadap total jumlah kelompok organisasi Pramuka yang ada baru mencapai 25 %.

2.3.1.19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

A. Prosentase Peserta Sosialisasi yang memahami nilai-nilai ideologi bangsa

Wawasan kebangsaan adalah suatu wawasan yang memandang bangsa dari aspek Ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan keamanan dan agama. Dimana dengan cara pandang seperti itu akan mencerminkan jati diri bangsa, untuk mewujudkan wawasan kebangsaan seperti yang diharapkan diperlukan

pemasyarakatan atau sosialisasi kepada masyarakat antara lain ideologi bangsa pancasila.

Adapun pada pelaksanaan sosialisasi ideologi bangsa atau Pancasila yang diikuti oleh 125 peserta sosialisasi ternyata yang benar-benar berdasarkan post test adalah sebanyak 75 peserta sedangkan sisanya masih perlu pendalaman lagi.

B. Jumlah LSM dan Ormas yang memahami etika berdemokrasi

Pembinaan kemandirian jumlah LSM dan Ormas yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon dilakukan untuk lebih mendorong tumbuh dan berkembangnya organisasi - organisasi kemasyarakatan sebagai wadah berhimpun bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di daerah. Adapun jumlah LSM dan Ormas yang memahami etika berdemokrasi di Kota Cilegon 76 lembaga.

C. Prosentase Jumlah Peserta yang memahami masalah kebencanaan

Perlunya kesiapsiagaan dan antisipasi di dalam penanggulangan bencana sangat dibutuhkan bila mana terjadi, maka dari itu Pemerintah Kota Cilegon mengadakan kegiatan pelatihan dan sosialisasi kebencanaan. Adapun jumlah peserta pelatihan pencegahan dan pelayanan penanggulangan bencana adalah sebanyak 120 orang terhadap jumlah korban bencana yang ada sebanyak 230 orang. Maka prosentase peserta yang memahami masalah bencana 52 %

2.3.1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

A. Tingkat kinerja Pelayanan perangkat daerah

Pelayanan publik menjadi suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien dan akuntabel akan mengangkat citra positif pemerintah Kota Cilegon di mata warga masyarakatnya. Hasil analisis indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pemerintah Kota Cilegon menunjukkan bahwa seluruh indikator penilaian menunjukkan kinerja **“baik”** dengan nilai indeks sebesar 68.64. Rekapitulasi hasil penilaian terhadap 14 indikator.

B. Tingkat ketersediaan produk hukum daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memegang prinsip Akuntabilitas tentunya perlu disandarkan oleh aturan hukum, pada tahun 2011 Pemerintah Kota Cilegon mengeluarkan Produk Hukum berupa Peraturan Daerah yang ditetapkan sebanyak 18 Perda dari jumlah usulan raperda 21 Raperda atau (85,71%) yang di setujui menjadi Perda, Peraturan Walikota sebanyak 42 Perwal, Keputusan Walikota sebanyak 544 SK

C. Tingkat pelaksanaan pengendalian pembangunan Daerah

Dalam UU No. 17/2003, tentang keuangan Negara digambarkan sistem penganggaran yang berbasis kinerja terpadu. Dalam UU ini menetapkan hubungan yang jelas antara rencana kerja, keluaran dan target yang dapat diukur, monitoring kinerja, **pengendalian** dan efektifitas biaya yang diaudit. Pengesahan anggaran-anggaran penyelenggara akan bergantung pada bukti kinerja dan efektivitas biaya penyelenggara kegiatan.

Dalam menjalankan amanat tersebut pelaksanaan pengendalian pembangunan merupakan salahsatu bentuk pertanggungjawaban yang memuat informasi capaian kegiatan yang dilakukan setiap SKPD secara priodik di Kota Cilegon. Tingkat pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah 94,43%

D. Tingkat kinerja kelembagaan perangkat daerah

Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan oleh Gubernur untuk Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Formasi dan persyaratan jabatan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Di Pemerintahan Kota Cilegon Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah memiliki Standar Operating Prosedur (SOP) adalah 2 OPD yaitu DPPKD dan RSUD, yang mendapatkan ISO baru 1 OPD yaitu DPPKD.

E. Tingkat pemenuhan dan efektifitas Kebutuhan perlengkapan daerah

Untuk mendukung tertib administrasi asset daerah, pemerintah melakukan pengendalian asset daerah guna meningkatkan pengelolaannya. Hal ini berupa pembenahan penatausahaan aset melalui pengolahan data hasil sensus barang daerah. Sedangkan untuk mendukung kelancaran pelayanan publik telah dilakukan pengadaan berbagai barang daerah. Pengadaan barang daerah berupa tanah, kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, dan kebutuhan lainnya.

Tingkat pemenuhan saat ini belum dapat dihitung karena data asset saat ini sedang dalam proses inventarisasi.

Di Tahun 2011 asset yang sudah terinventarisasi sebesar 85.97% hal ini ada beberapa asset yang belum selesai terinventarisasi hasil kerjasama dengan BPKP.

F. Tingkat kinerja pelayanan Legislatif Daerah

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa di antara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing. Pada tahun 2011, terdapat 18 Raperda yang disetujui untuk menjadi Perda, dari keseluruhan 21 Raperda yang telah diajukan. Dengan demikian, maka capaian kinerja yang didapatkan adalah sebesar 85,71 %.

G. Tingkat proporsionalitas belanja daerah

Dalam program pengelolaan anggaran dan perbendaharaan keuangan daerah pada tahun 2011 melalui jumlah belanja langsung dalam APBD Rp. 439.051.576.168,00 milyar belanja tidak langsung dalam APBD Rp. 474.907.001.905,00 milyar, secara akumulasi total belanja Rp. 913.958.578.073,00. Sedangkan pendapatan sebesar Rp. 894.973.346.173,00, dan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 26.485.231.900,00 dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 7.500.000.000,00 total pendapatan ditambah penerimaan pembiayaan dan dikurangi pengeluaran pembiayaan adalah sebesar Rp. 913.958.578.073,00. Total belanja dan pendapatan ini belum diaudit oleh BPK.

H. Peningkatan Pendapatan Daerah dari sektor Pajak

Salah satu indikator kinerja pemerintah kota cilegon dalam Program Peningkatan Pajak Daerah pada tahun 2011 melalui peningkatan pajak daerah sebesar Rp. 157.649.968.761 milyar, jumlah PAD Rp. 253.212.312.004.831 milyar total pendapatan daerah Rp. 172.969.160.026 milyar.

I. Tingkat penilaian kinerja keuangan daerah

Salah satu indikator kinerja pemerintah kota cilegon dalam Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah melalui tingkat penilaian kinerja keuangan daerah adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

J. Besaran Realisasi Pendapatan

Salah satu indikator kinerja pemerintah kota cilegon dalam Program Perencanaan dan Pengendalian Dana Perimbangan melalui besaran pendapatan Kota Cilegon adalah realisasi besaran pendapatan Rp. 858.320.973.326 Milyar dan realisasi dana perimbangan Rp. 579.508.968.485 milyar.

K. Persentase SKPD yang temuannya berkurang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, maka fungsi dan peranan Lembaga Pengawasan sangatlah strategis. Untuk itu diperlukan adanya kemauan, komitmen serta kemampuan dari segenap Jajaran Aparatur Pemerintah untuk menumbuh kembangkan budaya pengawasan, sehingga dapat menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan suksesnya dalam pengelolaan pembangunan. Pengawasan berfungsi untuk mengetahui informasi tentang perkembangan aktivitas perbaikan dan kegiatan pembangunanyang dilaksanakan oleh seluruh SKPD. Pada Tahun 2011 angka capaian jumlah unit organisasi yg diperiksa hasil temuannya menurun sebanyak 34 Objek Pemeriksaan(Obrik) terhadap seluruh jumlah Objek Pemeriksaan(Obrik) yang diperiksa sebanyak 71 Objek Pemeriksaan(Obrik) atau sebesar 47.9 %.

L. Tingkat kualitas peningkatan karir SDM aparatur

Sebagai salah satu syarat bagi aparatur Pemerintah yang telah menduduki jabatan harus mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya, menurut data di lapangan bahwa belum semuanya aparatur pemerintah Kota Cilegon yang memenuhi persyaratan jenjang karir aparatur, jumlah pejabat yang ada di lingkungan

Pemerintahan Kota Cilegon sebanyak 799 pegawai, sedangkan jumlah pejabat yang baru mengikuti diklat kepemimpinan sebanyak 583 pegawai, sehingga capaian dari program ini sebesar 72,97 %.

M. Tingkat kualitas SDM aparatur

Dengan meningkatkan kualitas profesionalisme aparatur pemerintah, maka kemajuan pembangunan dapat dicapai, termasuk di dalamnya pemberian pelayanan prima terhadap masyarakatnya, oleh karena itu perlu di dukung oleh kualitas peningkatan karir Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang professional. Pada tahun 2011 total dari jumlah pegawai aparatur (PNS) di Kota Cilegon sebanyak 6.034 orang, sedangkan jumlah PNS yang berpendidikan Strata 1 (S1) ke atas sebanyak 3.006 orang sehingga kalau di presentasikan jumlah pegawai PNS yang berpendidikan S1 ke atas di Kota Cilegon sebesar 49,81 %, hal ini terbukti ada kemajuan dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya mencapai 42,54 %

N. Tingkat manajemen administrasi Kepegawaian

Dalam memberikan pelayanan kepada aparatur pemerintah secara profesional, jujur adil dan merata dalam melaksanakan manajemen kepegawaian untuk menciptakan suatu sistem yang mampu mengembangkan, profesionalisme yang berorientasi pada kinerja sehingga terciptanya good governance (Pemerintahan yang baik).

Dimana Jumlah administrasi kepegawaian yang dilayani sebanyak 3.294 berkas terhadap Jumlah administrasi kepegawaian yang seharusnya dilayani sebanyak 3.294 berkas, sehingga tingkat manajemen administrasi kepegawaian mencapai 100 %

O. Tingkat ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menciptakan Suatu keadaan yang dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur, maka diperlukan suatu upaya tindakan yang kontinyu dan berkelanjutan dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman di Kota Cilegon, dengan adanya program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat diharapkan terciptanya keamanan , ketertiban, dan ketentraman di Kota Cilegon sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor: 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon disebutkan bahwa tugas pokok Satpol PP adalah melaksanakan tugas Walikota dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota. Sesuai

dengan tugas pokoknya menempatkan satuan polisi pamong praja pada posisi yang strategis sebagai garda terdepan dalam menyelenggarakan ketertiban umum ketentraman masyarakat serta menegakkan peraturan daerah. Pada Tahun 2011 angka capaian jumlah kejadian terkait ketentraman dan Ketertiban dan keindahan yang tertangani sebanyak 125 terhadap jumlah kejadian terkait ketentraman dan Ketertiban dan keindahan Masyarakat yang teridentifikasi sebesar 125 atau mencapai 100 %.

P. Cakupan pelayanan penanggulangan Kebakaran

Penanggulangan kebakaran merupakan salah satu bentuk pelayanan masyarakat oleh Pemerintah Kota Cilegon, namun **peran serta masyarakat** untuk ikut berpartisipasi bersama-sama petugas Kantor Pemadam Kebakaran dalam penanggulangan bahaya kebakaran yang terjadi di wilayahnya adalah **mutlak dilakukan**, karena tanpa peran serta masyarakat tersebut sulit bagi petugas Kantor Pemadam Kebakaran dapat secara optimal melaksanakan tugasnya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pemadaman kebakaran, mengingat sumber daya manusia dan kelengkapan sarana dan prasarana yang terbatas. Sampai saat ini **cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran mencapai 100%**. Tetapi yang dapat dilayani dengan tingkat waktu tanggap (response time rate 15 menit) dalam layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) adalah sebesar 81%.

Q. Tingkat kinerja pelayanan perangkat Kecamatan

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan tidak hanya di tempuh melalui keputusan-keputusan akan tetapi juga melalui peningkatan kemampuan aparat dalam memberikan pelayanan, Guna mendukung terciptanya *Good Governance* yang optimal, maka perlu juga memperhatikan bagaimana pelayanan yang dilakukan terhadap warganya. Pelayanan adalah suatu yang sangat subjektif dan sulit untuk diidentifikasi. Hasil analisis indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada tingkat kecamatan Pemerintah Kota Cilegon menunjukkan bahwa seluruh indikator penilaian menunjukkan kinerja **“baik”** dengan nilai indeks sebesar **70,04** nilai ini didapat dari penilaian 14 Indikator layanan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/ /M.PAN/2/2003 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

2.3.1.21. Ketahanan Pangan

A. Proporsi jumlah RTS yang dapat memenuhi Pola Pangan Harapan (PPH)

Salah satu kinerja pemerintah kota cilegon dalam program pengembangan ketahanan pangan yaitu dengan pemberian wawasan pola pangan harapan kepada 14.368 RTS. Pada program ini telah mencapai target yang dicapai dari 14.368 RTS.

2.3.1.22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

A. Jumlah RTS yang mendapat BML

Salah satu indikator kinerja Pemerintah Kota Cilegon dalam program pemberdayaan masyarakat kelurahan adalah dengan bantuan masyarakat langsung (BML) kepada 14.368 RTS atau 100 % ke seluruh 43 kelurahan. Pada program ini telah mencapai target yang dicapai dari 14.368 RTS.

B. Rasio jumlah LPMK terhadap jumlah kelurahan

Salah satu indikator kinerja Pemerintah Kota Cilegon dalam program pemberdayaan masyarakat kelurahan adalah rasio jumlah LPMK yang sudah mencapai 43 LPMK untuk masing-masing kelurahan.

C. Proporsi jumlah LPMK yang aktif terhadap total jumlah LPMK

Salah satu indikator kinerja Pemerintah Kota Cilegon dalam program pemberdayaan masyarakat kelurahan adalah PLMK. Pada program ini mencapai target yang telah ditetapkan yaitu ke pada 43 LPMK. Pada program ini mencapai target yang telah ditetapkan pada 43 LPMK.

D. Proporsi jumlah UMKM yang menerapkan TTG terhadap total jumlah UMKM

Salah satu indikator kinerja Pemerintah Kota Cilegon dalam program pemberdayaan masyarakat kelurahan adalah melalui UMKM dimana UMKM diberikan binaan melalui posyantek dan wartek tentang TTG. UMKM yang telah menerapkan TTG sebanyak 10 UMKM sehingga tercapainya target yaitu 100 %

E. Jumlah posyantek mandiri baru

Salah satu indikator kinerja Pemerintah Kota Cilegon dalam program pemberdayaan masyarakat kelurahan adalah melalui pembentuk posyantek. Posyantek yang telah dibentuk pada tahun 2011 sebanyak 1 lembaga atau 100 % dari target yang dicapai.

F. Jumlah wartek baru

Salah satu indikator kinerja Pemerintah Kota Cilegon dalam program pemberdayaan masyarakat kelurahan adalah melalui pembentuk posyantek. Wartek yang telah dibentuk pada tahun 2011 sebanyak 1 lembaga atau 100 % dari target yang dicapai.

G. Proporsi jumlah wira usaha baru yang terlatih terhadap total jumlah wira usaha baru

Salah satu indikator kinerja Pemerintah Kota Cilegon dalam program pemberdayaan masyarakat kelurahan adalah melalui wira usaha baru yang terlatih yang mana jumlah wira usaha baru yang dilatih tahun 2011 sebanyak 327 orang sedangkan akumulasi wira usaha usaha baru yang dilatih sampai dengan tahun 2011 sebanyak 2.127 orang sedangkan jumlah seluruh wira usaha yang ada sebanyak 10.522 orang sehingga proporsi jumlah wira usaha baru yang terlatih terhadap total jumlah wirausaha baru sebesar 20%.

H. Proporsi jumlah RTS yang mendapat penyuluhan pemberdayaan masyarakat terhadap total jumlah RTS

Salah satu indikator kinerja Pemerintah Kota Cilegon dalam Program Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan. Jumlah RTS 15.961 dan RTS yang mendapat penyuluhan tahun 2011 sebanyak 800 RTS dan keseluruhan yang telah mendapat penyuluhan sebanyak 1900 RTS. Prosentase jumlah RTS yang sudah mendapat penyuluhan adalah sebesar 11.9%

I. Proporsi jumlah RTS yang mendapat penyuluhan pangan dan gizi terhadap total jumlah RTS

Salah satu indikator kinerja Pemerintah Kota Cilegon dalam Program Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan. Melalui program ini tahun 2011 pemerintah Kota Cilegon telah melakukan penyuluhan kepada 660 RTS dari total 15.961 RTS. Total RTS yang telah mendapatkan penyuluhan sebanyak 2220 RTS. Prosentase jumlah RTS yang sudah mendapat penyuluhan pangan dan gizi adalah sebesar 13,90%.

2.3.1.23. Statistik

A. Tingkat ketersediaan data statistik daerah

Statistik arti sempit sebagai data berperan dalam penelitian untuk mengenali atau menunjukkan adanya masalah (problem identification). Dengan tersedianya data statistik dalam berbagai jenis yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, akan mudah dilihat adanya masalah. Data statistik juga merupakan sebagai indikator penyusunan rencana kerja tanpa data pelaksanaan pembangunan tidak dapat diukur dengan baik.

2.3.1.24. Kearsipan

A. Tingkat kualitas pengelolaan arsip Daerah

Di dalam penerapan pengembangan Arsip Daerah di Kota Cilegon telah di canangkan ke setiap unit kerja untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Arsip Daerah, adapun yang sudah di terapkan di 28 sekolah dan 18 SKPD.terhadap 79 unit kerja.

2.3.1.25. Komunikasi dan Informatika

A. Prosentase program pembangunan yang dapat terinformasikan melalui media cetak dan elektronik

Informasi di dalam pembangunan pemerintah daerah yang sangat penting untuk mendukung kelangsungan perkembangannya, sehingga terdapat alasan bahwa informasi sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Dalam rangka melaksanakan kegiatan rutinitas Pemerintahan daerah Kota Cilegon dalam upaya untuk mensosialisasikan informasi yang akurat kepada masyarakat Kota Cilegon dan mendokumentasikan setiap kegiatan–kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Kota Cilegon. Pada Tahun 2011 Persentase kegiatan pemerintah daerah yang di publikasikan melalui media cetak/elektronik mencapai 100%.

2.3.1.26. Perpustakaan

A. Jumlah kunjungan ke perpustakaan

Peningkatan jumlah Kunjungan masyarakat Kota Cilegon di dalam minat baca tahun 2011 sebanyak 38800 orang. ada peningkatan apa bila di bandingkan di tahun 2010 sebanyak 25247 orang.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1. Pertanian

A. Proporsi peningkatan produksi, produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Indikator kerja kinerja pemerintah Kota Cilegon dalam program pengembangan pertanian melalui peningkatan produksi, produktivitas pada atau bahan lokal lainnya adalah realisasi produksi padi tahun 2010 sebesar 15.593 ton dengan target peningkatan produksi sebesar 2,5 % maka target produksi padi tahun 2011 sebesar 15.982 ton. Realisasi produksi padi tahun 2011 sebesar 14.904 ton atau capain pada tahun 2011 sebesar 93,25 %. Produktifitas padi tahun 2010 sebesar 5,26 ton/ha dengan target peningkatan produktivitas 2,5 % makan target peningkatan produktivitas tahun 2011 sebesar 5,39 ton. Realisasi produktivitas padi tahun 2011 sebesar 5,11 ton/ha. Realisasi produktivitas 95,55%.

B. Proporsi peningkatan produksi unggas dan hewan kecil (domba/kambing)

Indikator kerja kinerja pemerintah Kota Cilegon dalam program pengembangan peternakan melalui peningkatan produksi unggas dan hewan kecil (domba/kambing) adalah realisasi produksi daging unggas tahun 2010 sebesar 238,71 ton dengan target peningkatan produksi sebesar 2,5 % maka target produksi daging unggas tahun 2011 sebesar 244,7 ton. Realisasi jumlah produksi daging unggas tahun 2011 sebesar 205,15 ton. Realisasi tahun 2011 mencapai 83,84 %.

Indikator kerja realisasi telur unggas tahun 2010 sebesar 678.457 ton dengan target peningkatan produksi sebesar 2,5 % maka target produksi telur unggas tahun 2011 sebesar 695.418 ton. Realisasi ketersediaan telur tahun 2011 sebesar 692.026 ton. Realisasi tahun 2011 mencapai 99,51 %.

Indikator kerja realisasi populasi ternak hewan (domba/kambing) tahun 2010 sebesar 14.228 ekor dengan target peningkatan produksi sebesar 2,5 % maka target populasi

ternak tahun 2011 sebesar 14.584 ekor. Realisasi populasi ternak tahun 2011 sebesar 14.256 ekor. Realisasi tahun 2011 mencapai 97,75 %.

2.3.2.2. Energi dan Sumber Daya Mineral

A. Kontribusi PDRB sektor pertambangan terhadap total PDRB

Salah satu indikator pemerintah kota cilegon dalam program pengembangan potensi sumber daya energi dan mineral yaitu dengan indikator PDRB pada sektor pertambangan. Total PDRB : 12.190.054,36 juta sedangkan PDRB sektor Pertambangan : 11.178,19, Prosentase kontribusi PDRB sektor pertambangan terhadap total PDRB sebesar 0,09%

B. Jumlah rumah yang terpasang satuan sambungan listrik

Salah satu indikator pemerintah kota cilegon dalam program pengembangan potensi sumber daya energi dan mineral yaitu dengan program listrik desa. Tahun 2011 terbangun 42 tiang dengan jaringan transmisi sepanjang 2200 m. Dari 2965 KK pada tahun 2009 sudah terpasang 818 KK, terdapat 2147 KK yang belum teraliri listrik pada tahun 2011.

2.3.2.3. Kepariwisataaan

A. Jumlah Objek daya tarik wisata

Salah satu kinerja pemerintah kota cilegon dalam program perencanaan dan pengembangan pariwisata ODTW, pada tahun 2011 telah dikembangkan sebanyak 1 ODTW yaitu wisata industri.

2.3.2.4. Kelautan dan Perikanan

A. Proporsi peningkatan jumlah produksi perikanan

Indikator kerja kinerja pemerintah Kota Cilegon dalam Program Pengembangan Kelautan dan Perikanan melalui peningkatan jumlah produksi perikanan adalah realisasi produksi perikanan tahun 2010 sebesar 409,3 ton dengan target peningkatan produksi sebesar 23,7% maka target produksi tahun 2011 sebesar 506,3 ton. Realisasi produksi perikanan tahun 2011 sebesar 480,8 ton. Realisasi mencapai 94,96%.

B. Tingkat konsumsi ikan

Indikator kerja kinerja pemerintah Kota Cilegon dalam Program Pengembangan Kelautan dan Perikanan melalui konsumsi ikan adalah realisasi tingkat konsumsi ikan tahun 2010 sebesar 20,91 kg/kapita/tahun dengan target peningkatan konsumsi ikan sebesar 14,8% maka target konsumsi ikan tahun 2011 sebesar 24 kg/kapita/tahun. Realisasi konsumsi ikan tahun 2011 sebesar 21,4 kg/kapita/tahun. Realisasi mencapai 89,17%.

2.3.2.5. Perdagangan

A. Kontribusi PDRB sektor perdagangan terhadap total PDRB

Salah satu indikator kinerja pemerintah kota cilegon melalui dalam program pengembangan perdagangan yaitu dengan indikator PDRB pada sektor perdagangan sebesar Rp.2.008.040,65 juta. Total PDRB sebesar Rp. 12.190.054,36 Juta sehingga kontribusi PDRB sektor perdagangan sebesar 16,47%.

2.3.2.6. Industri

A. Kontribusi PDRB ADHK Industri terhadap total PDRB

Salah satu indikator kinerja pemerintah kota cilegon melalui dalam program kemitraan industri yaitu dengan indikator PDRB pada sektor Industri Total PDRB ADHK : 12.190.054,36 Juta PDRB ADHK Industri : 7.260.112,34, Prosentase PDRB ADHK Industri terhadap total PDRB sebesar 59,56%

B. Jumlah industri yang tumbuh dalam memanfaatkan potensi lokal

Indikator kinerja pemerintah kota cilegon dalam program kemitraan industri adalah tumbuhnya industri yang melakukan kemitraan. Pada tahun 2010 terdapat 107 perusahaan yang melakukan kemitraan, sedangkan pada tahun 2011 naik menjadi 113 perusahaan. Sehingga jumlah industri pada tahun 2011 tumbuh sebanyak 8 Industri, dengan target pertumbuhan industri yang melakukan kemitraan pada tahun 2011 sebanyak 5 Industri, maka capaian indikatornya melebihi target.